

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	Target Kinerja				Ket.
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
Bidang Pemberdayaan Perempuan																	
1	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pembangunan Gender	25%	25%	25%	25%	1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)				Sub Koordinator PUG Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan					
		Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan					1.1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Pemerintah Kewenangan provinsi yang melaksanakan Pengarusutamaan gender (PUG) yang harus ditingkatkan									
							1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	305	orang	110,539,075.00						
							1.2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Pemberian penguatan dan pengembangan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				Sub Koordinator PUG Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan					
							1.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	255	orang	469,999,784.00						
							1.3. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Kewenangan Provinsi	Persentase Pemberian penguatan dan pengembangan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				Sub Koordinator PUG Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya					
							1.3.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	1685	orang	97,800,000.00						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	Target Kinerja				Ket.
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
							2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KOMPREHENSIF				Sub Koordinator Perlindungan Perempuan					
							2.1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Advokasi Terhadap Para Pihak Lingkup provinsi dan lintas kab/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan									
							2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		350	orang	65,050,000.00						
							2.2 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi dilaksanakannya									
							2.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		26	orang	74,596,000.00						
UPTD																	
1	Meningkatkan Aksi, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Pelayanan Komprehensif	25%	25%	25%	25%	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban tindak kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif									
							Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab / Kota	Persentase Pemberian Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan									
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		200	orang	279,998,352.00	UPTD					
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan									
							Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi									
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		200	orang	254,504,000.00						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	Target Kinerja				Ket.						
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4						TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK																						
	Meningkatnya upaya Pemenuhan Hak Anak yang mendapat Pelayanan Komprehensif	- Persentase Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan - Persentase Kab/kota Layak Anak	25%	25%	25%	25%	- Program Pemenuhan hak Anak. - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Sub Keg. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak kewenangan Provinsi melalui Keg. Rapat-rapat KLA <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</i>	- Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.				- Kasi Permasalahan Sosial dan Penangganan Alternatif Anak										
													Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		1	Dokumen	83,693,076.00					
													Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		1	Dokumen	81,891,980.00					
													- Program Perlindungan Khusus Anak. - Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/kota. Melalui Keg. Pelatihan PATBM, dan Rapat-Rapat Koord. TPPO	- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A PPT/PKT di Rumah Sakit.				- Bidang Perlindungan Anak JF-PSM Sub Kord. Perlindungan Anak				
													<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>									
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		11	kabupaten	74,141,828.00											
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		1	Dokumen	109,700,000.00											
	Pemberdayaan Masyarakat Desa																					
	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENATAAN DESA <i>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</i>	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA														
								1	monev	45,012,600.00												
	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA <i>Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA														
								1	Dokumen orang	89,997,264.00												
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	25%	25%	25%	25%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA <i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
								1	monev kegiatan	50,071,500.00												
								2		244,613,132.00												
							<i>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>		5	kab/kota	69,997,250.00											
							<i>Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa</i>															
	Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT <i>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
												Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		11	lembaga	125,000,750.00						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	Target Kinerja				Ket.
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		1 Dokumen	114,997,264.00							
							100 orang										
							11 kab/kot a		89,999,910.00								
							11 unit										
							15 kegiatan		1,414,765,197.00								
							Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga										
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK																	
	MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT	USIA HARAPAN HIDUP	25%	25%	25%	25%	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	USIA HARAPAN HIDUP				Sub Koordinator KB					
							1.1. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Dalam Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Keluarga sejahtera	Persentase keluarga yang mempunyai ketahanan akan kerentanan ekonomi, sosial dan psikologis									
							1.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan melalui BKB,BKR,BKLL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya	11	11	142,816,762.00						
							2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	USIA HARAPAN HIDUP				Sub Koordinator Kespro					
							2.2. Kegiatan Pengembangan Desain Program,Pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi(KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kepesertaan ber-KB				Sub Koordinator Kespro					
							2.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan dan penyediaan materi promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Jumlah materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	11	11	53,276,524.00						
	MENINGKATNYA AKSES TERHADAP PENDIDIKAN	RATA RATA LAMA SEKOLAH	25%	25%	25%	25%	3. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata lama sekolah				Sub Koordinator PK					
							3.1.Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Advokasi Terhadap Para Pihak Lingkup provinsi dan lintas kab/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan									

[illegible]